

BAB II

MOHAMMAD NATSIR DALAM MASYUMI

A. Biografi M. Natsir

1. Latar Belakang

Di kota Alahan Panjang, tepatnya di kampung Jembatan berukir, M. Natsir dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908, kebetulan bertepatan dengan tahun Kebangkitan Nasional. Beliau putra dari Khadijah istri Idris yang bergelar Sutan Saripado dan bekerja sebagai juru tulis Konteler di Maninjau Kabupaten Agam.¹

Semasa kecil beliau diasuh dan didik dari dua lingkungan, antara lingkungan ulama dan lingkungan intelektual. Neneknya seorang ulama besar di Minangkabau demikian pula keluarga dan familinya, kebanyakan orang-orang cerdas dan terpelajar.²

Pendidikan pertama Natsir dimulai dari sekolah partikelir HIS Adabiyah Padang, yang mendidik siswanya dengan jiwa nasional, dan sanggup menampung serta mem-

¹Yusuf Abdullah Puar, M. Natsir 70 tahun Kenangan-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan, Pustaka Antara, Jakarta, 1978, hlm. 1-2.

²Sebenarnya Natsir berangkat dari lingkungan keluarga yang bercorak intelektual dan ulama, dua arus yang kuat ini menjelma menjadi ulama intelektual yang nyata dalam sosok M. Natsir.

beri kesempatan bagi anak-anak dari semua lapisan masyarakat. Hidup mandiri dirasakan Natsir di Padang ini bersama Makciknya yang bekerja sebagai pensotir kopi dengan penghasilan 80 atau 90 sen sehari untuk kehidupan mereka. Tentunya dengan penghasilan kecil ini Natsir kecil dituntut untuk memasak dan mencuci sendiri dan justru kehidupan seperti ini serasa nyaman baginya dan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri sendiri yang timbul dari kebiasaan dalam mengatasi kesulitan hidup".³

Perpindahan Natsir ke Solok membawa corak kehidupan tersendiri. Atas kebaikan H. Musa (seorang pedagang pasar) Natsir tinggal dan memperoleh pendidikan. Pada sore hari Natsir bersama Ubaidillah (putra H. Musa) belajar, mengaji Al Qur'an, sembahyang, belajar bahasa Arab dan Fiqih. Sedang sore hari juga di sekolah HIS Diniyah. Petang hari di HIS pemerintah (sekolah yang sebelumnya sempat menjadi angan-angannya).⁴ Menginjak kelas tiga di Diniyah Natsir dipilih menjadi guru bantu kelas satu, lantaran kemampuan beliau disamping keterbatasan gurunya. Namun rencana ini diurung-

³ Yusuf Abdullah Puar, Op. Cit., hlm. 4.

⁴ Atas kuasa Allah menang, Natsir sebagai anak seorang konteler yang semula tidak diterima pada HIS pemerintah berbahasa Belanda dan khusus bagi anak Wedana dan pegawai lain, akhirnya dapat diterima juga.

kan karena Natsir harus mengikuti kakaknya, Robi'ah di Padang. Bakal pendidikan di Solok cukup membekas di hati Natsir, bahkan sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku hidup Natsir dua belas tahun kemudian.⁵

Di kota Padang Natsir masuk kelas lima di sekolah HIS pemerintah yang sebelumnya pernah menolak dia. Selama tiga tahun Natsir dapat menyelesaikan pendidikannya dengan nilai lumayan, untuk itu ia berhak mendapatkan bea siswa untuk melanjutkan pada sekolah MULO (semacam SMP berbahasa Belanda).

Untuk pertama kali Natsir merasakan sebangku dengan anak-anak Belanda. Di MULO ini dirasakan olehnya perilaku diskriminasi terhadap anak pribumi dari gurunya. Perkelsihan yang sering terjadi antara anak Indonesia dengan Belanda kerap dilihat gurunya dari sudut politik. Mereka tidak meredakan suasana, bahkan sering kali melontarkan kata-kata dalam kelas yang amat menjengkelkan murid Indonesia. Di luar pendidikan sekolahnya Natsir mengambil kegiatan dalam organisasi. Pada waktu dia mengenal JIB dan menjadi anggotanya, dikatakan oleh Natsir, walaupun pada waktu itu kegiatannya belum bersifat politik namun menimbulkan kesadaran

⁵Yusuf Abdullah Puar, Op Cit, hlm. 6.

akan harga diri menghadapi golongan Belanda dan pementah Belanda. Kegiatan ini sepertinya yang diinginkan Natsir untuk mengenal kesadaran akan bermasyarakat.⁶ Setelah tamat dari MULO dengan predikat nilai terbaik dan berhak mendapat beasiswa untuk meneruskan lagi. Dengan beasiswa yang didapatkan dari MULO, Natsir masuk di sekolah AMS (A II) Bandung. Kesulitan dalam pelajaran latin dan kurang lancar dalam berbahasa Belanda membuat Natsir sering mendapatkan ejekan dari gurunya. Ejekan tersebut cukup menjadikan cambuk bagi Natsir untuk semakin tenggelam dalam belajarnya dan usaha keras ini membuahkan hasil dengan nilai sembilan untuk pelajaran Latin dan mendapat hadiah pertama dari pembacaan puisi dalam bahasa Belanda.

Ada suatu bekal pengalaman yang berharga, Natsir untuk pertama kali membuat telaah terhadap masalah sosial ekonomi yang menyangkut masalah perekonomian masyarakat, yakni pengaruh penanaman pabrik gula terhadap rakyat Jawa. Dalam analisisnya diungkapkan, dampak tanam paksa terhadap perekonomian rakyat, Natsir dapat membuktikan tanam paksa tidaklah menguntungkan rakyat itu sendiri, justru yang banyak mengeruk keuntungan adalah para pemilik modal dan para Bupati. Riset ter-

⁶Ibid, hlm. 8.

sebut memberi manfaat yang begitu besar untuk lebih meyakinkan adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda.

Untuk mengenal politik lebih jauh Natsir mengisi kegiatan di luar sekolah dengan mengikuti pidato-pidato H. Agus Salim, Cipto Mangunkusumo dan lain-lain.⁷ Kadangkala Natsir mengadakan dialog dengan salah seorang tokoh keagamaan dan politik, A. Hassan. Diskusi yang dilakukan berkenaan dengan masalah agama, politik dan gerakan kemerdekaan. Perlu juga diulas kembali bahasa Arab dan agama yang pernah dipelajarinya, tentunya A. Hassan banyak membantu dalam hal ini. Berangkat dari bekal pendidikan dari tokoh-tokoh di atas,⁸ akan sangat berpengaruh bagi jiwa, perpikir dan arah hidup Natsir selanjutnya.

⁷Salah satu segi yang perlu kita catat bahwa tidak dapat dipungkiri H. Agus Salim mempunyai andil dalam mempersiapkan (mengkader) generasi muda Islam untuk menduduki jabatan elite politik, mewakili umat Islam. Dari sisi ini nampaknya Natsir di antara yang mewarisinya (Endang Saifuddin Anshari, H.M. Amien Rais (peny), Natsir 80 tahun, Cet. kedua, Media Dakwah, Jakarta, 1988, hlm. 173.

⁸Dua di antara tokoh-tokoh yang berusaha mendidik generasi muda dalam menumbuhkan segi intelektual dan rohani yakni H. Agus Salim dan A. Hassan (Dalam Prisma, Islam dan Politik di Indonesia oleh Deliar Noer, 8 Agustus 1979, hlm. 6) cukup banyak berpengaruh dalam perkembangan berpikir Natsir, bagi Natsir, A. Hassan telah banyak memberikan bekal terhadap rasa percaya diri, mendorong untuk selalu berpikir dan maju. Dari

Ada peristiwa penting, bagi Natsir untuk pertama kali mengupas masalah keislaman dan dimuat dalam surat kabar AID dan diterbitkan dalam bentuk buku. Pada waktu itu Natsir bersama-sama teman sekolah AMS menghadiri ceramah pendeta Kristen Protestan, Dominique Christopher dengan memberi judul "Qur'an en Evangelie" (Perbandingan Antara Qur'an dengan Ajaran Nabi Isa), sedangkan yang kedua berjudul "Muhammad als profeet" (Muhammad sebagai Rasul). Pada waktu itu Natsir merasakan pidato itu sebagai serangan terhadap Islam, walaupun penyampaiannya secara halus, sampai tak terasa bahwa sebenarnya menghina Islam. Tentunya Natsir tak dapat begitu saja membantah sekaligus pidato itu. Atas kejadian ini kemudian diceritakan kepada A. Hassan, beliau memberikan saran untuk menanggapi dengan memberi berbagai bahan bacaan kitab bahasa Arab maupun Inggris tentang Islam dan riwayat nabi Muhammad saw. A. Hassan hanya menunjukkan letak alasan pembantaiahannya, sele -

A. Hassan pula beliau belajar agama melalui diskusi. Demikian halnya dengan H.A. Salim, tokoh banyak berpengaruh dalam mengisi dimensi politik dalam diri Natsir. Dengan metode mendidik mandiri dalam memecahkan berbagai kesulitan itu dikatakan Natsir berguna untuk menumbuhkan keberanian dan kedewasaan yang nantinya akan memunculkan corak kepemimpinan baru. Satu lagi di antara tokoh di atas adalah Ahmad Syurkati, yang walaupun Natsir jarang bertatap muka dengan beliau namun ada satu hal yang berkesan dalam benak Natsir ialah selain beliau tidak banyak berbicara beliau juga mendidik rasa mandiri dan tanggung jawab terhadap generasi muda (lihat A.W. Pratiknya (peny), Percakapan Antar Generasi, Pesen Perjuangan Seorang Bapak, 1988, hlm. 19-21.

bihnya Natsir harus mencari sendiri dan mempertanggung jawabkan sendiri. Dari uraian di atas menunjukkan metode A. Hassan dalam mendidik kemandirian untuk menangkis serangan dari musuh-musuh Islam. Semenjak itu hampir seluruh waktunya tersita untuk mempelajari masalah kemasyarakatan, masalah-masalah Islam beserta umatnya, melalui wadah JIB Natsir mengajak kepada pemuda untuk berkhidmat pada Islam dengan berbagai ceramah dan perdebatan. Karena reputasi Natsir yang menonjol, beliau dipilih menjadi ketua JIB (1928-1932). Pada masa ini Natsir mulai berkenalan dengan Mr. Moh. Roem, Mr. Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito. Dicobanya untuk mengajar di MULO.

Setelah lulus, hatinya tak tergerak sedikitpun untuk meneruskan menjadi Master in de Rechten (walau pun Natsir mendapat beasiswa untuk itu), hanya satu keinginannya yaitu berkhidmat pada Islam. Beliau ingin mendalami tentang Islam.

2. Aktivitas dan Karya.

Setelah lulus dari MULO, Natsir banyak mengkoncentrasikan diri untuk memperdalam pengetahuan agama bersama A. Hassan, karena ini merupakan dan memang menjadi cita-citanya sejak semula. Untuk kegiatan lain be-

liau lebih men-aktifkan diri pada organisasi kemasya-
rakatan dan politik.

Bersama A. Hassan, Natsir memulai kariernya da-
lam mengarang, menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab
(yang berkenaan tentang agama ke dalam bahasa Indone-
sia dan Belanda. Selain kitab-kitab berbahasa Arab dan
Inggris, tafsir Al Qur'an ditelaah juga sebagai bahan
referensi. Majalah bacaan M. Natsir adalah Al Manar,
yang berisi tentang Islam dan perjuangan umatnya. Ke-
giatan lainnya adalah menerbitkan majalah "Pembela Ia-
lam".

Penerbitan majala Pembela Islam merupakan hasil
kerja sama antara A. Hassan dan Natsir. Majalah ini
berusaha untuk menangkis serangan terhadap islamofobia
yang pada waktu itu orang takut menyebut Islam, karena
kejayaan komunis serta PNI. Di antara para penulis ma-
jalah ini adalah M. Sabirin, seorang pemuka PSI, Ali
Harahap penganjur Al Irsyad dari Surabaya, A. Hassan ,
telah menulis artikel "Soal Jawab" dalam masalah aga-
ma, dan yang menjadi inti tulisan dalam majalah adalah
dari M. Natsir. Setiap orang yang membaca majalah ini
akan merasakan semangat perjuangan dan bahkan membuka
mata ke mana arah yang harus dituju.⁹

⁹Penji Masyarakat, 15 Juli 1978, No. 251, hlm.19.

Sebagai seorang pemuda yang kreatif, Natsir banyak menelorkan hasil karya bermutu yang begitu analitis sehingga mampu memberikan aliran baru bagi para pelajar saat itu, di antaranya "Mohammad als profect" dan "Qur'an en Evangelie", upaya menangkis kecaman pendeta terhadap Islam yang kemudian diterbitkan oleh A. Hassan dalam bentuk buku kecil. Sejak duduk di AMS Natsir telah menulis kitab "Pengajaran Shalat" dengan bahasa Belanda "Kom tot het Gebed" berbentuk diklat bagi pedoman mengajar Islam, kemudian terus mengalir untuk kerangan berikutnya dengan judul "Kebangsaan Muslim" dalam bentuk bahasa Indonesia, "Gouden regels uit de Qur'an" yang menguraikan masalah-masalah Islam dan ditujukan kepada kaum terpelajar didikan Barat untuk menyelidiki Islam yang sebenarnya. Selanjutnya kerangan beliau muncul lagi dengan judul "De Islamitische vrouw en Haar Recli" pada tahun 1933, berikut pada tahun 1936 "Cultur Islam" yang merupakan hasil kerjasama dengan Prof. Schumaker. Karangan dengan judul "De - ngen Islam ke Indonesia Mulia" diterbitkan pada tahun 1939, sedangkan pada tahun 1940 Natsir menerbitkan karangan dengan judul "Indonesia Sumber Bahagia". Ada lagi yang berjudul "Fiqh Al Da'wah", Islam dan Akal Merdeka", "Capita Selecta" dan seterusnya. Berawal dari beberapa karangannya yang dihasilkan dari keteliti-

an menganalisa dan kecintaannya untuk menyelidiki agama hingga membuahkan hasil karya bermutu menyebabkan Natsir mendapat tempat istimewa di kalangan pemuda dan mendapat kemajuan yang pesat semasa di JIB. ¹⁰

Tidak kalah sibuknya Natsir pada waktu itu, bersamaan setelah lulus dari AMS (1927-1932) beliau masih meneruskan studinya untuk mempelajari tentang Islam pada: "Persatuan Islam" Bandung. Mengingat kedudukannya sebagai anggota redaksi tetap "Pembela Islam" M. Natsir akhirnya sering berbicara tentang persoalan agama dan politik.

Banyak tulisan-tulisan Natsir yang bersifat analitis pada majalah "Pembela Islam", sehingga mampu mematahkan serangan-serangan lawan. Suatu kali pernah Dr. Sutomo (1888 - 1938) mengejek bahwa "pergi ke Digul lebih baik daripada pergi ke Makkah" dengan gesit "Pembela Islam" tampil untuk menangkis. Demikian pula ketika Gerakan Kebangsaan yang dipimpin Soekarno melalui PNI menyerang Islam, maka "Pembela Islam" tampil dengan tindakan sama. Bila PNI tampil dengan semangat nasionalnya dalam menentang penjajah, sebaliknya Natsir dengan kawan-kawannya dari "Pembela Islam" bergabung de-

¹⁰M. Natsir, Islam Sebagai Ideologi, Cet. II, Pustaka Aida, Jakarta, tt., hlm. 3.

ngan PSII tampil memukul partai yang tidak berdasar Islam dan mencaci maki Islam. Dari situlah nantinya muncul tulisan Natsir tentang persoalan Islam dan kebangsaan, sehingga sering terjadi pertentangan pendapat antara Natsir dan Soekarno.¹¹

Bermodal semangat kebangsaan menyala dan kecondongan jiwanya terhadap agama menyebabkan beliau memasuki pergerakan agama. Besar juga hasrat Natsir untuk merubah sistem pendidikan Islam yang ada.¹² Melalui musyawarah bersama A. Hassan (gurunya) dan Fachruddin Al Khairi diputuskannya untuk mendirikan "Pendidikan Islam", adapun motivasi Natsir adalah untuk menjadikan manusia "seimbang", antara aspek keduniaan dan rohani, yakni seimbang kecerdasan akal dan imannya. Menjadi manusia yang percaya pada diri sendiri. Manusia yang seimbang disebut oleh Natsir "ummatan wasathan" umat yang berkeseimbangan.¹³

¹¹Yusuf Abdullah Puar, Op Cit, hlm. 21-23.

¹²Melalui dari beberapa sepak terjangnya dalam menghadapi pergolakan politik ketika menjadi redaktur Pembela Islam dan anggota teras JIB, Natsir berpendapat bahwa bagi orang yang menentang dan mengejek Islam disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka sejak kecil serta lingkungan kebarat-baratan. Oleh karenanya Natsir terpanggil untuk membenahinya melalui pendidikan.

¹³Yusuf Abdullah Puar, Op Cit, hlm. 34.

Telah disadari oleh Natsir bahwa dirinya bukan seorang yang dididik khusus dalam ilmu keguruan, maka diputuskannya untuk kursus guru diploma Lager onder - wijs (LO). Dari bekal ilmu pengetahuan ini Natsir dapat menyusun rencana "pendidikan Islam" yang mempunyai empat tingkatan di mulai dari TK, HIS, MULO, Kweek - School (sekolah guru). Sekalipun pendidikan ini mengalami kesulitan dana, namun ternyata tetap bertahan bahkan mampu berkembang. Pendis ini berdiri selama sepuluh tahun (1932-1942) selama masa itu Natsir menjadi direktur "Pendidikan Islam", pada saat pendudukan Jepang Pendis bubar karena semua sekolah partikelir ditutup. Pada masa Pendis ini Natsir menemukan jodohnya, seorang pemuda bernama Nur Nahar yang bertindak sebagai guru TK.¹⁴ Aktivitas lain dari Persatuan Islam, Natsir menjadi pengurus besar Persatuan Islam (1937) yang sebelumnya diketuai oleh A. Hassan.

Sangat pesat kemajuan yang diperoleh Natsir dalam berorganisasi, sewaktu berdiri Partai Islam Indonesia (1940), beliau adalah orang yang pertama kali menyambut kehadirannya. Setelah didirikan Partai Islam Indonesia (yang nantinya disingkat PII) di Bandung, be-

¹⁴ Ibid, hlm. 27-41.

liau dipilih sebagai ketua cabang. Dari sinilah bermulanya Natsir menceburkan diri pada partai politik yang berdasar Islam sebab organisasi yang berbau Islamlah, letak kecondongan jiwanya.¹⁵ Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diikuti Natsir, yakni selain bergerak dalam Persatuan Islam dan Pendis kemudian PII dan pada tahun 1942 dipilih menjadi salah seorang anggota MIAI dengan demikian beliau ikut menceburkan ke dalam kancah politik secara langsung.

Kadangkala Natsir mengikuti jalannya perdebatan "Cou Sangi In" Dewan Perkembangan Politik ini terus beliau pantau terus. Dalam perjalanan berikutnya Natsir dipercaya untuk menjadi anggota KNIP (bentuk dasar dari parlemen sementara RI), badan ini diubah menjadi MPR dan DPR. Pada tanggal 25 November 1945 Natsir dipilih sebagai Badan Pekerja KNIP sampai 3 Juni 1946.

Selang waktu sebelumnya 7 November 1945 telah dilangsungkan kongres peleburan seluruh partai Islam menjadi partai Politik Islam masyumi, Natsir ketika itu dipilih menjadi anggota PB Masyumi. Sebagai seorang politikus yang dilatarbelakangi oleh kondisi pada waktu itu, Natsir betul-betul berjuang mempertahankan kemer-

¹⁵M. Natsir, Op Cit, hlm. 4.

20
deksen serta menegakkan agama Islam melalui wadah Ma -
syumi.

Pada tanggal 29 Juli 1946 Natsir ditunjuk menja-
di Menteri Penerangan pada pembentukan kabinet Syahrir
kedua, berkat kerja keras, jabatan yang pertama kali
dipegang sudah menghasilkan program yang terkenal de-
ngan nama "Pancasila" kementerian penerangan, bahkan
program ini masih dipergunakan sebagai pedoman kemen-
terian walaupun beliau sudah tidak menjabat Menteri
Penerangan.¹⁶ Kalau diteliti lebih dalam lagi, kesi --
bukan Natsir ternyata tak hanya dapat dilihat di dalam
organisasi saja akan tetapi beliau juga dipercaya du-
duk dalam pemerintahan sebagai menteri penerangan se -
lama tiga kali, untuk selanjutnya beliau meletakkan ja-
batan ini karena harus memusatkan perhatian pada Ma -
syumi. Pada Kongres IV di Yogyakarta bulan Desember ,
Natsir dipilih menjadi ketua DPP Masyumi, jabatan ini
beliau pegang sampai tahun 1958.

Melalui "Mosi Integralnya" yang terkenal dalam
menyelamatkan negara membawa Natsir ke jenjang keduduk-
an pada kepala pemerintahan, kemudian beliau dipilih
menjadi perdana menteri pertama negara kesatuan Repub-
lik Indonesia. Dapat dibayangkan bagaimana kesibukan

¹⁶Ibid, hlm.5.

kegiatan Natsir waktu itu. Selain dipercaya sebagai ketua DPP partai Masyumi, beliau juga dibutuhkan untuk menjabat dalam pemerintahan.

Sebagai orang pertama sekaligus juru bicara partai politik Islam Masyumi hingga tahun 1952 beliau terjun paling depan dan terlibat langsung dalam pergolakan dan pergulatan politik praktis ketika itu yakni semasa di bawah pemerintahan presiden Soekarno. Bahasa-basanya biasa saja dengan Bung Karno (ketika masih belum menjabat presiden), lalu berbeda pendapat dalam berbagai persoalan nasional terutama masalah demokrasi sampai akhirnya bertentangan paham ketika presiden condong ke arah diktator dan akrab dengan PKI. Pada akhirnya ketegangan semakin memuncak sehingga menyebabkan Natsir dan beberapa kawan sependirian baik partai maupun bukan, bergabung dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra yang secara frontal melawan Bung Karno tahun 1958.

Di bawah pemerintahan ORLA yang berkolaborasi pada PKI tersebut akhirnya M. Natsir bersama tokoh-tokoh anti komunis lainnya meringkuk dalam penjara dan pada masa ORBA (1966) beliau dibebaskan. Karena jiwa perjuangan yang tak pernah padam, selanjutnya beliau terjun ke dalam lapangan perjuangan bidang dakwah Islami-

27
yah Indonesia dan bertindak sebagai ketuanya. Selain itu juga diangkat sebagai wakil presiden Muktamar Alam Islamy bermarkas di Karachi dan menjadi anggota terhormat Majelis Ta'sisi Robithah. Walaupun organisasi ini tidak bergerak langsung dalam bidang politik namun dalam perjalanannya mengikuti pergerakan politik secara intensif melalui kantor-kantor perwakilan di PBB maupun badan organisasi dunia lainnya. Dengan demikian berarti organisasi ini selalu memonitor persoalan yang menyangkut nasib Islam beserta umatnya.

Pada informasi terakhir sekitar tahun 80-an beliau mendapat hadiah penghargaan Internasional dari raja Faisal, sebagai penghormatan beliau kepada Islam dan umatnya.

B. Partai Politik Islam Masyumi (1945-1960)

1. Berdirinya Partai Masyumi.

Perkembangan partai politik di Indonesia pada masa permulaan kemerdekaan menunjukkan lebih besar pengaruh kelompok netral agama ketimbang kelompok

Islam.¹⁷ Fenomena dari situasi ini telah mendorong para pemimpin Islam untuk bergegas memperkokoh barisannya demi kepentingan politik umatnya.

Benih dari upaya tersebut nampak pada pertemuan yang diselenggarakan oleh pemimpin Islam, tanggal 2 Oktober 1945 di Balai Muslimin Indonesia, untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas mereka dalam arena perjuangan umat.¹⁸ Jadi Masyumi yang dimaksudkan untuk itu akan diubah menjadi partai politik.

¹⁷ Kedudukan umat Islam yang tidak menguntungkan ini bermula dari kehadiran kelompok nasionalis sekuler (meminjam istilah Endang Sifuddin) yang mendominasi panggung politik nasional, terutama pada masa akhir pemerintahan Belanda dan Jepang. Realita tersebut dapat dilihat dari sikap Jepang (pada masa akhir pendudukan) yang lebih memberikan peluang terhadap pihak terakhir dalam memegang kendali politik setelah Indonesia merdeka. Bisa juga ditelusuri dari sedikitnya wakil-wakil Islam yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI tercatat 15 dari 60 anggota, 17 dari 68 orang (dari kalangan Islam) yang duduk sebagai wakil dalam BPUPKI (1944) dan hanya dua dari 21 anggota, dan 3 dari 27 anggota dari golongan Islam sebagai wakil PPKI (1945). Keadaan ini berlanjut dengan gagalnya kelompok Islam untuk mempertahankan Islam sebagai ideologi (Fachry Ali, *Op Cit*, hlm. 81 - 82). Kaitannya dengan ini Deliar Noer menyebutkan, bahwa kalimat yang berbunyi "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" yang tercantum dalam Piagam Jakarta, inilah yang dipertahankan oleh umat Islam. (Lihat Prisma 8 Agustus 1979, hlm. 9).

¹⁸ Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup K.H.A. Wachid Hasyim dan Karangan Tersiar, Panitia Buku Peringatan Al Marhum K.H.A. Wachid Hasyim, Jakarta, 1957, hlm. 449-450.

Sebagai pemula dari upaya di atas, maka para pemimpin Islam senior mengadakan pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1945 dalam suatu kongres yang merencanakan untuk membentuk organisasi baru dan undang-undang yang mengubah Masyumi menjadi partai politik.¹⁹ Tercatat nama-nama M. Natsir sebagai ketua panitia, sedangkan anggota-anggotanya adalah Soekiman Wirdjosandjojo, A. Wachid Hasjim, Abi Koesno Tjokro Soejoso Wali Al Fatah, Sri Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, A. Gaffar Umar dan seterusnya.²⁰

Didukung oleh adanya maklumat wakil presiden M. Hatta No. IX tanggal 3 November 1945 bahwa "pemerintah akan gembira menyaksikan berdirinya partai politik karena dengan keberadaannya berarti segala aspirasi politik dalam masyarakat dapat tersalurkan melalui wadah yang teratur."²¹ Dengan lahirnya Masyumi

¹⁹Benedict R.O.'G Anderson, Java in a Time of Revolution, Cornell University Press, p. 177.

²⁰A. Syafi'i Ma'arif, Dr. Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

²¹B.J. Boland, Pergulan Islam di Indonesia (Penter), Grafiti Pers, 1985, Cet. I, hlm. 44. Bisa juga ditemukan dalam sejarah nasional Indonesia V yang tidak jauh berbeda dengan isi Maklumat di atas. Secara lengkap Maklumat Pemerintah No. X/1945 dengan ditanda tangani wakil presiden sebagai berikut:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, dengan adanya partai itulah dapat dipimpin ke jalan teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

orang berpendapat, didirikannya Masyumi kembali merupakan respons positif umat Islam atas maklumat tadi.²² Dan yang lebih penting dari itu, lahirnya Masyumi adalah sebagai jawaban atas keperluan umat Islam untuk memiliki institusi politik yang mampu memperjuangkan aspirasi politik mereka di pentas nasional.²³

-
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah disusun sebelum melangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari. Terambil dari (Kementerian Penerangan, kepartaian dan Parlemenarian Indonesia, Jakarta, 1954), (Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, Sartono Kartodiredjo, Sejarah Nasional Indonesia VI, 1975, hlm. 247-248)

Maklumat pemerintah yang menggesa terhadap berdirinya partai politik itu agaknya berusaha meyakinkan bahwa negara Indonesia bercorak demokrasi (Nugroho Notosusanto, Marwati Doened Poeponegoro, Sartono Kartodiredjo, Sejarah Nasional Indonesia, VI, 1975, hlm. 247 - 248).

²² Beberapa cendekiawan, misalnya Syafi'i Ma'arif, Deliar Noer. B.J. Boland, cenderung berpendapat, lahirnya Masyumi didorong oleh adanya Maklumat Pemerintah. Namun kalau disimak lebih jauh tidaklah lebih baik dari itu. Terlepas dari pendapat, Maklumat merupakan penyebab dari berdirinya Masyumi, yang jelas penulis telah menemukan pernyataan dari tokoh Masyumi yang nadanya sangat konterversi dari pernyataan sebelumnya. Dengan tegas Prawoto Mangkusasmito menyatakan Berdirinya Masyumi bukan semata-mata timbul dari Maklumat 3 November 1945, namun keputusan tentang berdirinya partai (Masyumi) sudah terbentuk selang waktu sebelum Maklumat dikeluarkan (Lihat Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Documenta, Surabaya, 1972, hlm. 65).

²³ Fachry Ali, Op Cit, hlm. 85.

Lahirnya Masyumi di atas telah mendapat sambutan dari segenap umat Islam dan para pemimpin terutama Jawa dan Madura, akhirnya tanggal 7 November diadakan kongres yang menghasilkan suatu kebulatan tekad yang berbunyi:

Bismillahirrohmanirrohiem

Moe'tamar (Kongres) Oemat Islam Indonesia Jang diselenggarakan di kota Djogjakarta tanggal 1 - 2 Dzoelhidjdjah 1364 (7 - 8 November 1945), dihandiri oleh wakil-wakil oemat Islam Indonesia dari seloeroeh Djawa dan Madoera.

Menimbang:

Bahwa perjoeangan "Oemat Islam Indonesia oentoek menegakkan agama Allah dan kedaulatan negara Republik Indonesia, hanja dapat dilakoekan sesempurna-sempurnanya, dengan keboelatan tenaga dan himmah dari segenap oemat Islam Indonesia yang tersoesoen rapi dan dikerahkan dalam satoe badan perdjoeangan poelitik.

Bahwa badan perdjoeangan politik ini ditjiptakan sebagai pendjelmaan dari Madjelis Sjoera Muslimin Indonesia (Masjoemi), jang sampai sekarang meroepakan satoe poesat permoesjawaratan Oemat Islam, mendjadi satoe-satoenja Partai Politik Islam di Indonesia.

Sedangkan tujuan partai:

- a. Menegakkan kedaulatan Repoeblik Indonesia dan agama Islam.
- b. Melaksanakan tjita-tjita Islam dalam oeroesan kenegaraan Indonesia.²⁴

Secara sederhana kebulatan tekad di atas dapat diartikan, segenap pemimpin Islam dari berbagai macam

²⁴Diambil dari karya tak dipublikasikan (Skripsi) Mughil Son Haji yang juga mengambil referensi dari ("Perslah Ringkas" Soera Moeslimin Indonesia, No. 20 th. III, 6 Desember 1945, hlm. 2).

golongan telah bersepakat untuk menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya sarana politik umat Islam demi menegakkan negara dan agama serta melaksanakan cita-cita Islam. Masyumi yang dilahirkan pada 7 November adalah benar-benar rekayasa dari pemimpin Islam, yang mendapat dukungan penuh, baik dari kelompok tradisional maupun modernis.

Masalah dipergunakannya kembali nama Masyumi, tidaklah berarti organisasi ini sama dengan di masa Jepang, namun organisasi ini betul-betul baru, baik dalam hal nama (tidak merupakan singkatan) dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia) maupun berlainan tujuan dan perjuangan.²⁵ Semula nama Masyumi ini diusulkan "Partai Rakyat Islam".²⁶

2. Struktur Organisasi Masyumi.

Masalah struktur ini selalu menjadi pembahasan dalam tiap kongres Masyumi. Persoalan ini terus berlangsung dari awal kelahiran (1945) Masyumi hingga berakhirnya (1960).

²⁵ Aboe Bakar Atjeh, Op Cit., hlm. 349.

²⁶ Akan tetapi berdasarkan penghitungan suara dalam Kongres dengan perbandingan 52 : 50, 52 untuk keung-
gulan "Masyumi", 50 untuk "Partai Rakyat Islam" yang telah ditolak.

Secara garis besar Masyumi mempunyai keanggotaan yang bersifat unitaris atau mendua, yakni anggota biasa (perseorangan) dan anggota luar biasa istimewa (organisasi),²⁷ anggota biasa partai terdiri WNI yang beragama Islam (laki-laki perempuan) berumur 18 tahun atau sudah kawin. Sedangkan anggota istimewa terdiri dari pengurus besar pusat perhimpunan Islam yang bukan partai politik.²⁸ Anggota perseorangan (biasa) mempunyai hak bersuara, bagi anggota istimewa mempunyai hak untuk memberi nasehat.²⁹ Sistem keanggotaan yang dijalankan Masyumi ini cukup ber-alasan, karena melalui sistem ini dapat memberi peluang besar terhadap organisasi Islam ataupun perseorangan untuk menjadi anggota Masyumi. Dengan demikian maka Masyumi praktis dapat dilihat sebagai wakil umat tanpa ada yang merasa tidak terwakili.

Kaitannya dengan sistem keanggotaan di atas Masyumi juga membentuk badan khusus yang bersifat otonom dan ditentukan dalam peraturan tertentu pula.

²⁷Deliar Noer, Op Cit, hlm. 48.

²⁸A.D. Masyumi 1952 ps. V ayat 1 sub C lihat Aboe Bakar, Op Cit, hlm. 405.

²⁹A.R. Masyumi 1952 ps. 8 ayat 5 sub A. Lebih lengkap tentang hak dan kewajiban anggota istimewa dan biasa, terdapat dalam A.R. Masyumi ps. 8 ayat 1-5 (Lihat, Ibit, hlm. 411-412).

Di antara badan-badan khusus yang terbentuk (didirikan) misalnya: STII (Serikat Tani Islam Indonesia) yang didirikan 1946, bertugas mengumpulkan zakat untuk dibagikan pada yang berhak, di samping dipergunakan bagi pengelolaan bidang pertanian dan usaha lain yang lebih produktif. Sedangkan SDII (Serikat Dagang Islam Indonesia) bergerak dalam bidang yang sama, yakni sama-sama mengumpulkan zakat, namun beda penggunaannya, misalnya, dana yang telah dikumpulkan STII dipergunakan untuk mendirikan Bank Pembangunan Umat, demi membantu para pedagang kecil dan orang-orang tak bermodal dalam usaha dagang melalui pemberian kredit bersifat lunak. Pada bidang Perburuhan tersedia SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia) dibentuk tanggal 27 November 1947 di Solo, diperuntukkan bagi kalangan buruh yang berideologi Islam, dengan menggerakkan dan meningkatkan daya saing lapangan perburuhan dengan serikat-serikat sejenis pada bidangnya. Khusus untuk organisasi wanita dinamakan muslimat.³⁰ Segi kemiliteran dibentuk Sabilillah dan Hisbullah. Sabilillah terdiri dari orang Islam lebih tua dari Hisbullah yang terbentuk dari Gerakan Pemuda Islam, didirikan sejak masa pendudukan

³⁰Ibid, hlm. 408.

Jepang pada tanggal 8 Desember 1944. Sedangkan Sabi - lillah didirikan pada saat berlangsungnya Mu'tamar umat Islam di Yogyakarta. Ketua organisasi tersebut berfungsi sebagai penegak agama Islam dan kedaulatan negara Republik Indonesia, juga untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam pada urusan ketentaraan.³¹

Di samping uraian badan-badan otonom dari Masyumi di atas, Masyumi juga menjalin hubungan erat dengan GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) yang berdiri sejak 2 Oktober 1945, bahkan juga dengan organisasi lain, seperti PII (Pelajar Islam Indonesia), berdiri bulan Mei 1947 dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) berdiri bulan Februari 1947, dua organisasi terakhir, yang menunjukkan sikap independen ini, kelihatan lebih mesra berhubungan Masyumi ketimbang dengan organisasi lain,³² terutama pada masa revolusi dan tahun

³¹Data-data tentang anak organisasi di atas selengkapnya, penulis ambil dari Aboe Bakar, Op Cit, hlm. 385, Deliar Op Cit, hlm. 55-56, Mughil Sonhaji, Op Cit, hlm. 130.

³²Ada satu keistimewaan bagi organisasi lain untuk menjalin hubungan dengan Masyumi, yang dikenal memiliki banyak intelektual. Selain itu para pemimpin Masyumi memberikan keleluasaan untuk mudah dihubungi dan sikap ini kemungkinan timbul karena para pemimpin tersebut lebih memahami kehidupan para pelajar seperang yang pernah mereka alami dan umumnya para mahasiswa lebih bisa berkomunikasi tentang problemnya. Dalam hal ini kualitas intelektual para pemimpin Masyumi tak perlu diragukan bahkan menjadi kebanggaan bagi PII dan HMI pada masa itu.

pertama setelah revolusi.

3. Struktur Kepemimpinan Masyumi.

Menginjau pada struktur kepemimpinan partai kembali lagi ditinjau secara global dapat dikelompokkan dalam dua lembaga kepemimpinan dalam partai, yakni pertama dikenal dengan badan legislatif dan yang kedua eksekutif. Yang dimaksud dengan lembaga legislatif adalah Mu'tamar, yaitu merupakan badan tertinggi (A.D. Masyumi 1952 ps. IX, ayat 1), dan kekuasaan tertinggi kedua adalah Dewan Partai dan Majelis Syuro, sedangkan yang dimaksud dengan badan eksekutif dipegang oleh pengurus besar. Susunan kepemimpinan Masyumi tahun 1945 ini selanjutnya mengalami perubahan pada tahun 1949, perubahan tersebut telah menggeser Majelis Syuro³³ yang semula merupakan badan legislatif digantikan oleh Dewan Partai, sedangkan tugas eksekutif dilaksanakan oleh Pimpinan Partai.

Menginjau 1950 sampai 1952 terjadi dualisme dalam struktur pimpinan pusat. Pada tahun 1951 selain

³³ Kedudukan Majelis Syuro yang terdiri dari beberapa ulama, yang semula banyak berperan dalam Dewan Partai dan sebagai Badan Legislatif berubah menjadi Badan Penasehat, yang lama kelamaan tak mempunyai pengaruh dalam tubuh partai (Aboe Bakar Atjeh, Op Cit, hlm. 563).

ditunjuk seorang presiden partai dengan dibantu dua orang presiden, juga terdapat Dewan Pimpinan yang bersifat eksekutif, melakukan tugas harian pimpinan. Sistem ini ternyata tidak bertahan lama, karena menemui beberapa persoalan. Akhirnya dualisme kepemimpinan ini dihapus pada kongres tahun 1952.³⁴

Lain halnya ketika masa revolusi, pimpinan partai terletak pada mereka yang profesional dalam perjuangan pergerakan masa sebelum perang. Soekiman dan Abi Koesno misalnya, mereka termasuk golongan tua. Golongan muda sebenarnya mendapat tempat dalam farum nasional, terutama melalui keanggotaan mereka dalam pemerintah, namun kedudukannya tidak sebanding dengan kelompok tua. M. Natsir umpamanya, beliau punya reputasi baik dan pengaruh besar, terutama menjelang berakhirnya revolusi, namun sebagaimana diungkapkan Deliar Noer, tidaklah dibenarkan oleh tradisi untuk mengesampingkan pimpinan yang lebih tua.³⁵ Oleh karenanya untuk mempersatukan antara kedua kubu tersebut, dibentuklah dualisme struktur pimpinan di atas, yaitu pembentukan presidium dengan diketuai oleh Soekiman

³⁴Deliar Noer, Op Cit, hlm. 58-59.

³⁵Ibid, hlm. 60.

sedangkan tugas eksekutif dipercayakan pada M. Natsir.

Untuk dapat melihat susunan kepemimpinan Masyumi dari periode ke periode lebih baiknya penulis paparkan selintas susunan pimpinan pusat Masyumi dari periode awal hingga akhir.

- Pimpinan Pusat Masyumi 1945

Ketua	: Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Ketua Muda I (Wk. Ketua I)	: Abikusno Tjokrosujoso
Ketua Muda II (Wk. Ketua II)	: Wali Al Fatah
Sekretaris I	: Harsono Tjokroaminoto
Sekretaris II	: Prawoto Mangkusasmito
Bendahara	: Mr. R.A. Kasmat

- Pimpinan Pusat Masyumi 1949

Presiden	: Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Wk. Ketua I Presidium	: Mr. Kasman Singodimedjo
Wk. Ketua II Presidium	: Mr. Jusuf Wibisono
Ketua	: M. Natsir
Wakil Ketua I	: Prawoto Mangkusasmito
Wakil Ketua II	: Mr. Mohammad Roem

- Pimpinan Pusat Masyumi 1952

Ketua	: Mohammad Natsir
Wakil Ketua I	: Dr. Soekiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II : Mr. Kasman Singodimedjo

- Pimpinan Pusat Masyumi 1954

Ketua : Mohammad Natsir

Wakil Ketua I : Dr. Soekiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II : Mr. Kasman Singodimedjo

- Pimpinan Pusat Masyumi 1956

Ketua : Mohammad Natsir

Wakil Ketua I : Dr. Soekiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II : Prawoto Mangkusasmito

Wakil Ketua III : KH. Fakhri Usman

Sekretaris Umum : M. Yunan Nasution

- Pimpinan Pusat Masyumi 1959

Ketua : Prawoto Mangkusasmito

Wakil Ketua I : Dr. Soekiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua II : K.H. Fakhri Usman

Wakil Ketua III : Mr. Mohammad Roem

Sekretaris Umum : M. Yunan Nasution.

Jika di lihat dengan seksama struktur kepemimpinan di atas dari periode ke periode dapat digolongkan menjadi dua, masing-masing didominasi oleh kelompok yang berbeda yaitu periode awal (1945-1949) didominasi oleh kelompok tua. Adapun periode berikutnya

(1952-1960) tengah didominasi oleh kalangan muda melalui tokohnya M. Natsir. Pertengahan antara kedua periode itu terdapat fase peralihan yaitu di saat kelompok muda menancarkan pengaruhnya, bersamaan dengan itu kepemimpinan dari kelompok tua mencoba untuk bertahan.³⁶

3. Program Perjuangan Masyumi.

Pada Mu'tamar Masyumi ke VI, kurang lebih selama enam hari, tepatnya 24-30 Agustus 1952 di Jakarta, telah diputuskan program perjuangan Masyumi. Program tersebut menjabarkan secara ringkas pendirian serta program pokok yang ingin ditegakkan partai dalam hidup bernegara. Pokok dari program tersebut adalah:

1. Kenegaraan
2. Perekonomian
3. Keuangan
4. Sosial
5. Pendidikan dan kebudayaan
6. Politik luar negeri
7. Irian Barat.

ad.1. Kenegaraan

Masyumi berjuang demi tegaknya negara hukum menurut Islam yang berbentuk Republik. Demikian pula

³⁶Ibid, hlm. 99

77

tentang kebebasan beragama haruslah dijamin oleh negara. Sistem pemerintah yang dikehendaki Masyumi berbentuk presidentil dengan tanggung jawab presiden kepada DPR. Khusus untuk DPR Masyumi punya pendirian agar lebih menjamin kepentingan daerah, sebaiknya terdiri dari parlemen yang berdasar pemilihan umum dengan perwakilan berimbang, juga senat sebagai wakil melalui pemilihan di daerah. Masyumi menghendaki persamaan derajat antara kaum wanita dengan pria dalam hak, politik, sosial, ekonomi.

ad.2. Perekonomian.

Perekonomian negara berdasarkan ekonomi terpin-pin. Produksi dan distribusi barang hendaklah ditujukan pada kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Sikap monopoli dari perusahaan swasta dilarang. Konkurensi yang terbatas hendaklah bersifat membangun. Politik harga dan upah harus sesuai dengan keadaan perekonomian umum dalam negeri. Dalam memperkuat ekonomi nasional sebaiknya koperasi dibangun melalui bantuan pemerintah.

Menasionalisasikan perusahaan vital, bank sirkulasi (dilaksanakan tahun 1951, ketika Mr. Jusuf Wibisono menjabat menteri keuangan). Perusahaan perhubungan yang pokok di darat, udara dan laut. Perusa-

haan kepentingan umum dan tambang yang dijalankan berdasarkan keadaan dan keuangan negara.

Industrialisasi dibentuk demi membebaskan Indonesia dari keperluan impor, membuka lapangan kerja terutama di daerah-daerah yang padat penduduknya, sehingga modal asing dibenarkan atas dasar saling menguntungkan.

Kaum tani hendaknya dilindungi pemerintah dengan memberantas pemerasan terhadap kaum tani, menghapus sistem tuan tanah dan membagikan tanah kepada kaum tani. Penghapusan beban-beban yang tidak adil kepada petani, membangun koperasi, menjamin harga jual yang layak bagi hasil dari petani dan upah terendah bagi para pekerja tani.

Kaum nelayan hendaknya diperbaiki kedudukannya melalui bantuan pemerintah dengan melindungi koperasi nelayan, mengadakan latihan, memperluas modernisasi alat-alat dan pelabuhan perikanan laut serta menjamin harga penjualannya.

Undang-undang Agraria maka kolonial perlu disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Politik agraria hendak ditujukan pada usaha-usaha melipatgandakan produksi pertanian, terutama bahan pangan. Bagi golongan menengah ("middenstand") hendaknya diberi ke-

93

mudahan untuk berkembang dan memperkuat kedudukannya, karena ditinjau secara politik dan sosial (menurut pandangan Masyumi) penting artinya.

ad.3. Keuangan

Perlunya undang-undang bagi pemerintah untuk mengawasi politik kredit bank (nasional dan asing). Sistem pajak hendaknya disederhanakan dan tidak melampaui kekuatan masyarakat sehingga keadilan perlu ditegakkan melalui sistem ini dengan memajukan perusahaan nasional. Barang keperluan rakyat banyak sedapat mungkin tidak dikenakan pajak, sebaliknya pajak kemewahan diperluas.

ad.4. Sosial

Perlu penyempurnaan undang-undang perburuhan dengan memberikan jaminan sosial bagi kecelakaan, invaliditas hari tua, perjanjian kerja, upah terendah, pemberhentian, istirahat dan penyelesaian pertikaian. Buruh hendaknya disediakan "upah sosial" untuk keluarga dan hari tua, upah keluarga ditujukan bagi si buruh, istri dan rata-rata dua anak.³⁷ Adapun upah menurut banyaknya anak si buruh dirasakan kurang adil

³⁷Mengingatn penulis pada kebijaksanaan Orde Baru melalui Keluarga Berencanya, dengan semboyan Dua Anak Cukup.

99
terhadap majikan. Pemerintah hendaknya membimbing dan membantu mendidik syarikat-syarikat buruh ke arah yang membangun. Untuk memperbaiki keadaan masyarakat perlu adanya peraturan pemeliharaan anak-anak terlantar, reklasiring, pemberantasan pelacuran dan perjudian. Negara wajib memberikan jaminan yang layak bagi kaum cacat dan keluarganya, janda dan anak-anak para pejuang kemerdekaan yang telah gugur. Transmigrasi harus dipercepat menurut rencana tertentu.

ad.5. Pendidikan dan kebudayaan.

Selain sekolah-sekolah umum pemerintah hendaknya memberi subsidi kepada sekolah swasta agama. Pengusaha rendah dan menengah hendaknya ditujukan juga untuk mendapatkan kecakapan, kejujuran. Pendidikan agama di sekolah pemerintah ditujukan kepada pembentukan watak dan kepribadian sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berjiwa kemasyarakatan, bertanggung jawab, berdisiplin dan berkesosilaan. Bagi pemuda yang berbakat tapi tidak mampu, harus disediakan bea siswa yang cukup. Pendidikan jasmani perlu diperluas dan dipertinggi mutunya, sedangkan pendidikan rohani dilaksanakan menurut agama masing-masing. Gerakan kebudayaan disalurkan serta dibimbing oleh pemerintah ke arah budi dan watak yang luhur. Bagi ge-

rakan pemuda, seperti kependuan perlu ditunjang dan dibantu oleh pemerintah.

Politik luar negeri, Masyumi menentang tiap-tiap penjajahan karena bertentangan dengan asas Islam serta membantu tiap usaha untuk menghapuskannya. Politik luar negeri bertujuan untuk mempertahankan perdamaian dunia dan mencari persahabatan dengan semua bangsa, terutama dengan bangsa yang berasaskan ketuhanan dan demokrasi. Turut aktif memperkuat kedudukan PBB. Negara-negara harus menghormati hak masing-masing dan menjunjung tinggi perjanjian antara bangsa-bangsa berdasar atas asas kesusilaan.

Bantuan luar negeri guna mempercepat pembangunan negara dibenarkan, jika tanpa adanya ikatan militer dan politik.

Irian Barat tetap menjadi tuntutan nasional selama ia belum masuk wilayah Indonesia.

Program perjuangan Masyumi di atas ternyata bertahan lama, terbukti masih dipergunakan sampai Masyumi berakhir.

4. Perkembangan Partai Masyumi

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa berdirinya Masyumi dapat dukungan luar biasa dari u-

96

mat Islam, sehingga umat Islam hanya memiliki satu wadah politik, yaitu Masyumi. Dengan melihat dari segi dukungan maupun janji yang diikrarkan umat ini, tidak terlalu salah kiranya jika ditafsirkan bahwa partai ini mengalami perkembangan yang makin pesat, sehingga kalau diterjemahkan melalui istilah Kahin, partai Masyumi mengalami "To build up a huge".³⁸

Perkembangan tersebut dapat ditunjukkan dari jumlah pengikut yang makin bertambah. Masyumi yang semula hanya terdiri dari empat organisasi yaitu Muhammadiyah (dicap sebagai kelompok pembaharu), NU (kelompok tradisional), perikatan umat Islam dan persatuan umat Islam. Dua organisasi yang disebut terakhir bersifat tradisional dalam masalah agama. Dan sebaliknya dalam masalah keduniawian lebih bersikap modern. Sekitar tahun 1951 dua organisasi ini melebur menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia. Bagi organisasi lain seperti Persatuan Islam (Bandung) bergabung dengan Masyumi setelah organisasinya didirikan kembali, masing-masing dapat terlaksana pada tahun 1948 bagi Persatuan Islam dan tahun 1950 untuk Al Irsyad.

³⁸ Kahin, George MC. Turnan, Nasionalism and Revolution in Indonesia, Ithaca and London, Cornell University Press, 1970, hlm. 157.

Sedangkan organisasi-organisasi dari luar Jawa seperti Al Jamiatul Wasliyah (Sumatra Utara), Al Ittihadiah bergabung dengan Masyumi setelah lancarnya hubungan antara Yogya dan Sumatra Utara, dengan menjadikan diri mereka sebagai cabang Masyumi. Persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA) yang cukup berpengaruh di daerahnya bergabung dengan Masyumi tahun 1949 sampai 1953 (ketika terjadi pemberontakan Aceh yang dipimpin ketua PUSA, Tengku Daud Beureh Matha'ul Anwar (Banten), Nahdlatul Wathan (Lombok).

Begitulah perkembangan Masyumi. Organisasi ini lebih cepat tersebar di Indonesia dibanding dengan partai lain. Kecuali pada daerah non Islam, pengaruhnya tidak dapat masuk, antara lain: Bali (mayoritas beragama Hindu), Flores dan Timor Timur (beragama Katolik), dan Batak Toba, Menado (Protestan). Sedangkan pengaruh yang cukup besar di Jawa baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah dan Jawa Barat. Juga di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan lain-lain.

Dari segi lain perkembangan Masyumi juga ditunjang atas usaha yang dilakukan oleh anggota istimewa partai. Ini dimungkinkan karena pengaruh anggota istimewa sendiri yang sebelumnya memang sudah punya pe-

98

ngaruh besar pada daerah tertentu,³⁹ melalui kepeloporan para pemimpinnya di daerah dan pengaruh Islamnya yang cukup mengakar. Mereka merupakan pelopor utama bagi kelangsungan hidup partai.⁴⁰ Masih pada persoalan yang sama, tentang penyebaran partai, peranan ulama sangat besar artinya. Sedang kalau dilihat dari partai Masyumi sendiri menjadi satu-satunya partai politik Islam terbesar di Indonesia saat itu, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat ikut mengidentikkan diri atau bahkan mereka merasa lebih bangga menjadi anggota Masyumi.

Perkembangan partai Masyumi dapat pula dilukiskan bahwa pada tiap kabupaten ada cabang partai, bahkan hampir pada tiap-tiap desa di Jawa terdapat ranting Masyumi. Adapun di luar Jawa pembentukannya hingga ke desa-desa juga diselenggarakan. Hal ini sesuai dengan struktur partai yang telah dibentuk Masyumi

³⁹Deliar Noer, Op Cit., hlm. 49-50. Semisal NU mempunyai basis daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Juga Muhammadiyah, Al Jamiatul Wasliyah, PSII dan seterusnya.

⁴⁰Ungkapan di atas kalau dihubungkan dengan susunan partai, bahwa sebenarnya basis kekuatan partai terletak pada ranting (desa kampung), dapat dibayangkan peran ulama yang berdomisili di desa juga sangat berjasa terhadap perkembangan partai.

79
dari periode ke periode.⁴¹

5. Perpecahan Dalam Tubuh Partai Masyumi.

Sungguhpun sejak semula para pemimpin Islam telah sepakat untuk hanya memiliki sebuah partai politik Islam Masyumi, namun persatuan itu kurang dapat dipertahankan.⁴² Dengan kata lain, baik teori maupun praktek, semangat ikrar tersebut tidak dapat bertahan lama. Secara implisit Syafi'i Ma'arif menanggapi perpecahan itu datang dari gagalnya para pemimpin umat dalam menghadapi godaan politik yang kadang kala generik dan sistematis.⁴³

Awal perpecahan di atas ditandai dengan keluarnya PSII pada bulan Juli 1947 yang memproklamasikan dirinya sebagai partai politik tersendiri. Barang kali tak terlalu sulit untuk dimengerti, bahwa alasan pemisahan diri ini masih dalam lingkup tak kunjung da-

⁴¹Susunan selengkapanya dari periode ke periode, lihat Deliar Noer, Op Cit, hlm. 69-71.

⁴²Bahkan lebih analisis lagi Deliar Noer mengungkapkan bahwa semangat ikrar sejak masa revolusi (1945-1956) sudah pudar. Enggannya Perti (berpusat di Sumatra Tengah) untuk masuk dalam lingkungan Masyumi terbukti untuk itu, lihat Deliar Noer, Op Cit, hlm. 54.

⁴³A. Syafi'i Ma'arif, Dr. Islam dan Politik Dalam Pasang Surut Politik Islam, tt, hlm. 36.

50

tangnya buat kesempatan menduduki posisi politik dalam kabinet.⁴⁴ Walaupun peristiwa ini tidak banyak mempengaruhi perjalanan partai, karena memang PSII punya pengaruh politik terbatas, setidaknya tindakan pemisahan sudah menunjukkan mulai merapuhnyanya ikatan politik dalam tubuh partai.

Peristiwa di atas ternyata tidak cukup berhenti sampai di situ, yakni dengan sikap NU yang mengikuti jejak PSII untuk mengubah diri dari jami'iyah, gerakan sosial keagamaan, menjadi partai politik. Keluarnya NU pada bulan Mei 1952 ini merupakan pukulan berat bagi Masyumi. Mengingat organisasi ini mempunyai pengikut cukup besar, meliputi tiga propinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan. Besarnya pendukung NU ini dapat dibuktikan pada Pemilu 1955 beri -

⁴⁴Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca Cornell University Press, 1964, hlm. 139. Lebih jauh lagi menyebutkan alasan PSII keluar dari Masyumi, yakni ketika Masyumi menolak ajakan Formatur Amir Sarifuddin untuk mengikutsertakan kalangan Islam dalam membentuk kabinet. Pada saat itulah para pemimpin PSII (terutama Wondo Amiseno dan Ardji Karta Wineta) yang sebelumnya tidak banyak berperan dalam partai Masyumi, tergoda untuk duduk dalam kabinet Amir Sarifuddin. Ini dilakukan dengan alasan sebagai rasa tidak puas terhadap Masyumi. Selain itu kalangan PSII tidak sepakat dengan kebijaksanaan pemimpin Masyumi terhadap Belanda dalam menghadapi revolusi. Terutama dalam perundingan yang diwakili Mr. Moh. Roem dan M. Natsir sebagai wakil partai dalam kabinet Syahrir.

kutnya.⁴⁵

Perpecahan yang lebih serius di atas terjadi dari ketegangan, antara sayap kiri yang progresif yang disifati Kahin sebagai kelompok sosialis agama dan sayap kanan, konservatif yang terdiri dari para ulama.

Kalau diteliti lebih dalam lagi, sejak Mu'tamar ke IV di Yogya pada akhir tahun 1959 mengalami perubahan yang menyebabkan tergesernya kedudukan para alim ulama. Perubahan ini memberi indikasi bagi kecemburuan pemimpin NU. Dalam hal ini lebih jauh Aboe Bakar Atjeh berkomentar:

⁴⁵Rasa kekecewaan Masyumi dari hasil Pemilu '55 justru membawa keberuntungan di pihak NU, karena secara tak terduga ternyata NU muncul sebagai partai terbesar nomor tiga sesudah PNI dan Masyumi, dengan meraih 18,4% suara dari seluruh jumlah peserta Pemilu, oleh karenanya NU berhak mendapatkan 45 kursi dalam parlemen. Prosentase suara terbesar pendukung NU diperoleh di Jawa Timur dan Jawa Tengah 73,2% dari jumlah suara yang diterima secara nasional dan di Kalimantan Selatan (muncul sebagai partai terkuat) dengan 48,6% dari jumlah suara setempat (Syafi'i Ma'arif, Op Cit, hlm. 116. Dari besarnya pendukung NU di Jawa tersebut Boland menulis kesimpulan Feith (dalam buku *The Indonesia Elections of 1955*) bahwa NU merupakan partai khas Jawa ketimbang Masyumi yang memperoleh suara dari Jawa Barat sebagian besar dari luar pulau Jawa. (lihat Boland, Op Cit, hlm. 56).

"Sejak adanya kongres di Yogyakarta pada tahun 1949, Masyumi mengalami perubahan. Pada mulanya Majelis Syuro yang terdiri dari alim ulama mempunyai kedudukan yang penting di samping dewan partai dan mempunyai kedudukan sebagai badan legislatif. Tetapi sejak kongres itu Majelis Syuro dijadikan seakan-akan badan penasihat, yang hari demi hari disingkirkan dari kedudukannya yang penting. Para alim ulama mengerti hal ini, oleh karena itu terutama ulama-ulama yang tergabung dalam Nadlatul Ulama yang dalam masa revolusi sangat giat memimpin perjuangan umat Islam bersenjata, kelihatan seakan-akan menarik diri dan menunjukkan tidak aktif lagi. Bukankah hampir semua masalah ditinjau oleh Masyumi hanya dari sudut politik, dan sedikit sekali berpedoman kepada fatwa-fatwa dan amanat-amanat yang diberikan oleh alim ulama di dalam dan di luar Majelis Syuro.⁴⁶

Seperti yang diungkapkan dalam buku-buku kalangan NU, faktor penyebab utama perpecahan lebih banyak dipengaruhi oleh tersinggungnya perasaan (sentimen), sedangkan pengharapan untuk duduk dalam kementerian agama adalah sebagai pertimbangan taktis.⁴⁷

Keluarnya NU dari Masyumi secara resmi ditentukan dalam kongresnya di Palembang 1952. Bila dilihat lebih dalam lagi, baik dari pernyataan maupun kenyataan yang ada, yang jelas fenomena tersebut tidak terlepas dari masalah perebutan kursi kementerian agama pada pembentukan kabinet Wilopo (April 1952). Ini sebenarnya tak dipungkiri kalangan NU - dengan kelugas/

⁴⁶ Aboe Bakar, Op Cit, hlm. 563 dan 478.

⁴⁷ Ibid, hlm.

secara jujur Kyai Idham Kholid mengemukakan:

"Terus terang waktu itu lima menteri untuk Masyumi, empat telah diambilnya dan satu lagi masih diambilnya, kalau dikatakan NU keluar karena kursi kata Masyumi - dengan diplomatis Kyai Idham menimpali - kalau kita bersaudara mempunyai milik lima lantas tuan-tuan mengambil empat, sedang kita bersaudara menuntut satu saja tidak diberi, kita pecah, kalau memang benar karena kursi salah siapa - saya mau tanya, kilahnya.⁴⁸

Menghadapi persoalan di atas ada baiknya di -
ingat kembali dengan memberi gambaran selintas pembentukan kabinet Wilopo, yang menampilkan pemimpin Muhammadiyah : K.H. Faqih Usman⁴⁹ sebagai Menteri Agama, sedangkan kalangan NU yang diwakili Kyai Wahab tetap menuntut jabatan ini untuk Wahid Hasyim.⁵⁰

⁴⁸Deliar Noer, Op Cit, hlm. 87.

⁴⁹Terpilihnya Faqih Usman, sebenarnya melalui -
pungutan suara yang dilakukan dua kali, secara terus-menerus. KH. Faqih terpilih dengan suara terbanyak .
Dan Formatir Wilopo menyetujui pencalonan Faqih.

⁵⁰Tuntutan dari Kyai Wahab yang telah disetujui ketua NU ini, sepertinya wajar saja, karena menurut pengakuan Kyai Wahab selain organisasi NU besar juga ilmu, aqidah, amaliahnya sepeham dengan mayoritas umat Islam. Maka dari itu pantaslah NU menduduki kursi agama dan oleh karenanya beliau bersikeras dengan memberikan ultimatum "seandainya tidak dipenuhi (tuntutan tersebut) maka NU akan berjuang untuk mencapai tuntutan tersebut tidak melalui Masyumi lagi". Dan memang isi surat tersebut tidak hanya sekedar "gertak sambal" ketika tanggal 23 Maret tuntutan tersebut gagal disetujui dalam rapat. Sedangkan K.H. Faqih dalam pemilihan yang dilakukan secara demokratis berhak menduduki kursi menteri agama, maka di sinilah NU telah membuktikan untuk segera meninggalkan Masyumi, melalui rapat Pengurus Besar NU tanggal 5 April 1952.

Sebenarnya bukan hanya sekedar persoalan di atas yang menyebabkan NU keluar dari Masyumi, sekali lagi ditandaskan, persoalan pribadipun turut memainkan peran. Dalam lingkungan NU umumnya terdapat tradisi penghormatan terhadap ulama apalagi sesepuh, tapi sayang sekali nampaknya hal ini belum dimiliki oleh kalangan intelektual muda dalam tubuh Masyumi, walaupun ada hanya sebagian kecil. Ketidak serasian ini nampak pada kongres Masyumi di Yogyakarta 1949, menurut kalangan NU di antara peserta mulai memperlihatkan rasa tidak hormat kepada ulama, mereka menganggap lulusan sekolah Belanda lebih superior dari lulusan sekolah agama. Kejadian serupa tampak pada rapat Dewan Partai Masyumi di Bogor 1952, ketika itu KH. Wahid Hasyim berpidato, namun di antara para peserta selain NU tidak mendengar malah mengobrol sesamanya. Melihat gelagat ini KH. Idham Kholid memprotes pada ketua, M. Natsir. Atas kebijaksanaan M. Natsir rapat berjalan lancar. Dari sini KH. Idham Kholid mengakui kebijaksanaan M. Natsir yang hormat pada ulama.

Ada sisi lain yang mesti diperhatikan dalam persoalan di atas. Pergantian ketua dari tangan Soekiman kepada M. Natsir, Desember 1949 juga merupakan penye-

bab kurang mesranya hubungan Masyumi dengan NU. Di -
banding dengan Soekiman, M. Natsir sergolong telah
mempelajari Islam lebih dalam, beliau juga termasuk u-
lama, tamatan sekolah Barat serta mendapatkan pendid-
ikan agama dengan paham modern (dari hubungannya de-
ngan A. Hassan dan H. Agus Salim), tidak kalah juga
Soekiman, pernah mengecam sekolah Barat (Belanda), a-
kan tetapi pengetahuan tentang agama kurang begitu
dalam. Soekiman dapat dikatakan tak pernah berbicara
masalah agama di depan umum, bahkan tak pernah menu-
lis masalah-masalah agama. Bertolak dari sisi ini De-
liar Noer mengungkapkan, bahwa orang seperti Soekiman
yang mendalami Islam dan lebih banyak bergantung pada
ulama baik modern maupun tradisional. Dibanding de-
ngan M. Natsir yang mempelajari Islam dengan mendalam,
beliau termasuk juga setaraf dengan ulama dan mungkin
di antara mereka ada yang merasa terganggu oleh keha-
diran M. Natsir sebagai pemimpin Masyumi. Oleh kare-
nanya jika kedua tokoh itu dibandingkan, NU memang
lebih mudah berhubungan dengan Soekiman. Dengan kata
lain NU dengan kalangan berpendidikan Barat tapi ku-
rang mendalami Islam lebih mesra dari pada lulusan Ba-
rat tapi kurang mendalami Islam.⁵¹ Pernyataan terse -

⁵¹Deliar Noer, Op Cit., hlm. 89-90.

but tidak cukup sebagai satu alasan. Ada kalanya kelompok berpendidikan Barat memang menunjukkan rasa tidak hormat, terkadang mengeluarkan pendapat yang menyinggung perasaan ulama tradisional.

Terlepas dari sebab musabab perpecahan di atas mungkin pihak yang masih setia pada semangat ikrar November 1945 menganggap sikap NU sebagai oportunis. Namun bagi NU, perceraian politik adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dan jamaah mereka dari rasa tidak puas, baik politik maupun religius.

Mungkin berlebihan kalau dikatakan perpecahan itu mempunyai dampak dan radiasi hebat dan mengerikan.

6. Berakhirnya Masyumi (1960).

Setelah terjadi perpecahan dalam tubuh partai Masyumi, maka partai ini terus menerus menghadapi masalah, baik intern maupun ekstern terutama terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Semakin cepat dikukuhkannya "demokrasi terpimpin" semakin cepat pula langkah pembubaran partai Masyumi. Oleh karena masa ini menjadi penyebab dari pada pembubaran Masyumi, ada baiknya penulis ulas secara implisit latar belakang demokrasi terpimpin.

Orang sering menyederhanakan demokrasi terpim -

pin (1957-1965) dengan masa berlakunya pemerintahan otokrasi, yang menumpas tanpa segan setiap oposisi atau pandangan yang tidak menyukainya,⁵² atau konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Lebih cermat lagi M. Natsir mengungkapkan "dengan konsentrasi kekuasaan yang bertumpu pada seorang yakni Soekarno menguasai segalanya, sebagai presiden, penguasa panglima tertinggi, ketua Dewan Nasional dan bahkan menjadi ketua satu-satunya dan pada akhirnya demokrasi semacam ini justru menghilangkan demokrasi itu sendiri".⁵³ Untuk membuktikan kecaman M. Natsir ini dapat dilihat prospek dari pada implementasi idea di atas.

Pada bulan Oktober 1956, sebenarnya presiden sudah mengotak-atik konsepnya dan kemudian berkembang menjadi demokrasi terpimpin. Sebagai taktik jitu untuk melaksanakan idea tersebut diawali dengan menyampaikan kecamannya dalam pidato peringatan sumpah pemuda - atas penyesalan keputusan pemerintah 3 November 1945, yang menggesa berdirinya partai-partai. Di-

⁵² Deliar Noer, Op Cit, hlm. 349.

⁵³ Endang Saifuddin, Natsir 80 tahun, Op Cit, hlm. 134. Kalau kita tarik pengertian antara demokrasi di atas, terdapat kesamaan dalam definisi Holand, yang mengartikan demokrasi terpimpin dengan masa yang semakin lama Soekarno semakin menghimpunkan kekuasaan di tangannya sendiri.

katakannya bahwa keputusan tersebut merupakan kesalahan yang paling besar yang pernah diperbuat.⁵⁴ Oleh karenanya pada kesempatan itu dikemukakan pula gagasan "menguburkan semua partai". Dikatakannya bahwa dirinya akan merasa gembira jika semua pemimpin berunding untuk memutuskan pembubaran partai. Melihat adanya benih-benih demokrasi yang akan serna ini, segera saja M. Natsir memberikan reaksinya melalui wawancara dengan Koran Abadi 30 Oktober 1956, bahwa presiden mulai menampakkan rasa ketidakpuasannya terhadap partai. Beliau tegaskan pula bahwa "selama demokrasi masih ada selama itu pula partai ada, baik melalui maklumat pemerintah November 1945 ataupun tidak. Bila partai-partai telah dilebur, demokrasipun otomatis terkubur, sedangkan di atas kuburan itu tinggal diktator yang memerintah."⁵⁵ Sebenarnya M. Natsir tidak menentang "Demokrasi Terpimpin" dengan catatan bahwa demokrasi itu dibimbing serta dipimpin oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi.⁵⁶

Seiring dengan berbagai kontraversi di atas, situasi dalam pemerintahan sendiri juga didapati krisis dalam kabinet (yang sebelumnya diikuti dengan jatuh

⁵⁴Deliar Noer, Op Cit., hlm. 351.

⁵⁵Ibid, hlm. 254.

⁵⁶Ibid, hlm. 356.

59

bangunnya kabinet) terutama pada terbentuknya kabinet Ali Sastroamidjojo II. Bila dilihat sekilas perjalanan Ali II ini banyak mengalami kesulitan menjalankan programnya terutama sering terjadi perbedaan dengan presiden.⁵⁷ Kemajuan kabinet ini dihambat oleh pemogokan Serikat Buruh (diprakarsai oleh PKI) yang justru dilindungi oleh presiden, dan akibat dari insiden itu sendiri, produksi menjadi lemah. Belum lagi dengan terbengkalainya pembangunan di daerah. Bagi daerah-daerah yang banyak menghasilkan devisa negara yang tidak memperoleh keadilan dari hasil kekayaannya, terutama bagi pembangunan di daerahnya, otomatis ini menjadi persoalan yang amat besar, dan bila keadaan ini dibiarkan akan berlarut-larut dan menjadi "picu peledak" untuk mendirikan suatu pemberontakan atas ketidakadilan ini. Merajalelanya korupsi juga melanda pada masa kabinet ini, sehingga sering mendapat berbagai kecaman dari berbagai mass media. Dalam keadaan kacau serta hampir terjadi disintegrasi pemerintah, Masyumi sering mengeluarkan peringatan kepada pemerintah, namun pemerintah tidak memberi tanggapan yang memberi harapan dengan alasan bahwa pimpinan kabinet

⁵⁷Endang Saifuddin Anshori, M. Amien Rais, Op Cit., hlm. 147.

6

mempunyai pendapat lain. Walaupun sebelumnya pimpinan pusat Masyumi tidak punya niatan untuk menarik menteri-menterinya dari kabinet karena memikirkan upaya untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi pemerintah, namun karena langkah pemerintah itu sendiri tidak memberikan harapan dan keyakinan terhadap Masyumi akan menuju kesejahteraan rakyat dan negara, sehingga pada tanggal 9 Januari 1957 Masyumi tidak menangguh untuk menarik para menteri dalam kabinet.⁵⁸ Namun walaupun Masyumi telah menarik diri dari kabinet, tetapi masih bersedia bekerja sama namun dalam kondisi yang berbeda. Celakanya kerja sama itu sudah tertutup bagi Masyumi, sehingga Kabinet Ali melanjutkan kerjanya tanpa Masyumi.

Dalam suasana yang kacau, yakni ketika masa disintegrasi hampir terjadi, presiden masih sempat mengemukakan gagasannya, yang pusat pada corak demokrasi bagaimana yang akan ditampilkan (demokrasi yang tidak berkiblet pada Barat). Tujuan demokrasi yang

⁵⁸ Deliar Noer, Op Cit, hlm. 255. Lebih dari sekedar persoalan di atas jika melihat statemen 12 point yang ditanda tangani oleh M. Natsir dan Yunan Nasution, tidak menyetujui Ali, dan Nasution yang telah merencanakan menangani gerakan daerah dengan kekerasan. Sedangkan Masyumi menginginkan dengan jalan damai terlebih lagi jika Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pulih untuk mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh daerah tersebut.

6

ditempuh itu memberikan asumsi, adanya indikasi presiden hendak mengatur atau malah mengubah struktur pemerintahan. Untuk merealisasikan keinginannya pada tanggal 27 Januari 1957 diadakan rapat umum "Merah Putih" di Bandung, pada kesempatan ini presiden menyampaikan kehendaknya untuk mencampuri urusan pemerintahan, dengan mengemukakan suatu konsep yang katanya "untuk menyelamatkan Republik" yakni melalui langkah untuk menuju demokrasi terpimpin. Pada kesempatan lain konsep itu dikemukakan melalui pidatonya (bertepatan dengan peringatan sumpah pemuda) tanggal 21 Pebruari 1957 yaitu ide presiden untuk membentuk kabinet "Gotong Royong", yang berarti kabinet itu dibentuk dengan menyertakan semua golongan dalam kabinet. Dengan dalih untuk melindungi golongan yang lebih lemah terhadap golongan yang lebih kuat. Terkandung suatu maksud presiden untuk menyertakan PKI dalam kabinet, karena PKI juga mempunyai pengikut dari kalangan buruh. Sebagai pendamping kabinet ini telah dibentuk Dewan Nasional, yang bertindak sebagai badan penasihat baik diminta ataupun tidak. Sedangkan badan ini dipimpin oleh presiden sendiri. Berbagai macam reaksi atas tindakan presiden yang inkonstitusional dan mendukung PKI ini. Bagi para pemuda yang pro presiden tentu saja menerimanya dan bahkan meneriakkan yel-yel kepada

62

masyarakat untuk menerima konsep presiden ini. Demikian pula PNI, seperti tindakan yang dilakukan sebelumnya, menerima saja konsep ini, tidak demikian halnya Masyumi karena didorong oleh kesadaran akan bahayanya PKI masuk dalam kabinet, maka Masyumi tetap menolak konsep itu. Berbagai kritik dilontarkan oleh M. Natsir, semakin aktif presiden untuk melaksanakan kehendaknya, semakin gencar pula Masyumi idenya melalui komentar dan tulisan M. Natsir. Dalam suatu artikel yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan Masyumi yang disebarkan untuk umum M. Natsir menguraikan beberapa pandangannya yang berhubungan dengan demokrasi dan konsep presiden. Dikatakannya bahwa "demokrasi merupakan way of life, tidak pernah berubah",⁵⁹ ditandaskan pula bahwa dalam demokrasi tidak tumbuh demokrasi dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan, orang berbeda pendapat dengan pemerintah. Dalam artikelnya yang ditulis tanggal 5 Maret 1957, M. Natsir memperingatkan masyarakat terhadap kewaspadaan masyarakat akan bahayanya tawaran kerja dari komunis.⁶⁰ Selanjutnya M. Natsir juga mengingatkan akan bahayanya komunis dan demokrasi ala Soekarno, yang

⁵⁹Endang Saifuddin Anshori, M. Amien Rais, (Peny.)
ny), Op Cit., hlm. 128. Juga terdapat dalam Deliar Noer,
Op Cit., hlm. 354.

⁶⁰Deliar Noer, Op Cit., hlm. 359.

ditulis dalam artikel berikutnya. Kendatipun beberapa kritik dilontarkan untuk menolak konsepsi presiden, namun tindakan itu tidak digubris oleh pemerintah maupun oleh presiden sendiri, bahkan pada akhirnya presiden tidak segan-segan bertindak lebih jauh terhadap mereka yang melontarkan kritiknya.

Tepat pada saat penyerahan mandat kabinet Ali II, tanggal 14 Maret 1957 presiden mengukuhkan kedudukannya, dengan mendesak Ali untuk menandatangani pernyataan negara dalam keadaan bahaya (SOB). Atas kejadian ini mengundang banyak kritik, M. Natsir di antaranya yang menyatakan kritikan dengan tajam; "adakah sah seorang perdana menteri demisioner menyatakan SOB. Sedang pemerintahan pusat dalam keadaan aman, sungguh bertentangan dengan hukum ketatanegaraan. Tidak terlalu salah memang pernyataan ini, kalau keadaan SOB berarti semua kegiatan politik dibatasi, pernyataan politik dibatasi, sekaligus peres dibungkam, dalam keadaan seperti ini otomatis kedudukan presiden semakin kuat dan berarti pula presiden dapat leluasa menjalankan konsepsinya yang dicita-citakan sejak semula.⁶¹

⁶¹Endang Saifuddin Anshori, M. Amien Rais (penny), Op Cit, hlm. 152.

64

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 1957 presiden menunjuk Suwirjo (PMI) menjadi formatur kabinet dengan tidak meninggalkan pesan untuk mencantumkan, pembentukan Dewan Nasional. Merasa adanya sikap diskriminatif terhadap Masyumi, karena ternyata dalam kabinet ini Masyumi tidak diajak serta, Masyumi juga merasakan tindakan inmedanya instruksi dari presiden untuk menyisihkan partai politik Islam ini dari gelanggang pemerintahan (politik nasional).⁶² Setelah pada akhirnya kabinet ini menemui kegagalan karena NU menuntut untuk mengikutsertakan Masyumi, terutama sangat pentingnya kehadiran Masyumi dalam menangani masalah-masalah daerah yang telah mengambil oper kekuasaan dari pemerintah. Namun demikian kegagalan itu dapat dihindarkan oleh presiden dengan membentuk Zaken Kabinet, tanggal 25 Maret, suatu kabinet yang masih tetap melaksanakan kehendak presiden, yakni membentuk Dewan Nasional. Untuk rencana presiden yang terakhir ini Masyumi tetap berpendirian untuk tidak mau berkompromi walau dengan dalam kondisi bagaimanapun. Karena mendapat oposisi yang keras dari Masyumi, pembentukan kabinet ini memperlakukan diskriminatif terhadap Masyumi, ini tercermin dari sikap Suwirjo untuk membe-

⁶² Deliar Noer, Op Cit, hlm. 361.

65

lakangi Masyumi dan melakukan tawar menawar (bergai -
ning) terhadap anggota Masyumi agar meminta dispensa-
si terhadap partai untuk turut dalam kabinet. Dengan
demikian berakibat bahwa secara tidak langsung orang
akan menyalakan Masyumi kalau tidak turut serta dalam
kabinet. Dalam perjalanan selanjutnya kabinet ini mene-
mui kegagalan karena partai lain menolokak hadirnya
komunis dalam kabinet dan pada tanggal 2 November 1957
Suwirjo mengembalikan mandat pada presiden. Walaupun
kabinet ini gagal dalam mengemban tugas dari presiden
namun presiden masih tetap berupaya menjalankan ide -
nya, sehingga pada tanggal 4 April dibentuk "Zaken
Kabinet Darurat Ekstra Parleментар" dengan menunjuk
warga negara Indonesia Ir. Dr. Soekarno menjadi for -
matur kabinet, sedangkan Ir. Djuanda ditunjuk presi -
den sebagai perdana menteri, seperti yang terjadi se-
belumnya, diadakan rapat dulu, dengan memanggil para
politisi dari berbagai partai untuk memilih setuju
atau tidak terhadap kabinet yang dikehendaki presiden.
Melihat prosedur yang tidak wajar (kabinet dibentuk di
luar parlemen) M. Natsir tampil untuk menentangnya ,
"ditinjau dari sudut ketatanegaraan konsepsi itu me -
langgar UUD padahal pantang bagi seorang presiden me-
lakukan pelanggaran

lakukan pelanggaran terhadap hukum ketatanegaraan.

Ketegangan pada masa itu semakin diperuncing oleh masalah Irian Barat. Kekalahan pihak Indonesia dalam perdebatan di PBB menyebabkan demonstrasi anti Belanda. Diambil alihnya perusahaan Belanda di bawah koordinasi SOBSI organisasi serikat buruh PKI, kebrutalan terhadap warga negara Belanda terjadi di mana-mana, apalagi menteri kehakiman GA. Maengkong menginstruksikan untuk mengusir semua warga negara Belanda. Melihat instruksi Maengkong, M. Natsir mengajukan protes "tindakan tersebut tidak akan meredakan suasana, bahkan akan memburukkan citra Indonesia, sehingga sulit untuk mencari dukungan Internasional terhadap masalah Irian Barat". Sepontan saja tanggapan M. Natsir ini mendapat serangan dari Harian Rakyat PKI, yang menuduh M. Natsir sebagai antek Belanda dan melindunginya Belanda, bahkan M. Natsir mendapat ancaman.⁶⁴

⁶³ Endang Saifuddin Anshori (peny), Op Cit, hlm. 153. Penentangan terhadap tindakan yang disebut inkontitusonel ini tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata semata, bahkan Masyumi melarang anggotanya untuk turut dalam kabinet Djuanda, dan sanksi atas pelanggaran juga diberlakukan.

⁶⁴ Pemuda-pemuda PKI menuduh M. Natsir dengan mengkait-kan M. Natsir terhadap usaha pembunuhan terhadap Soekarno. Penelpon-penelpon gelap dan surat kaleng sering dialamatkan kepada beliau, bahkan mereka tidak segan-segan menyerbu rumah M. Natsir dari berbagai sudut walau sabutase ini tidak jarang dilakukan, namun pihak keamanan sendiri malah membiarkannya dan ketika Natsir melaporkan ke kejaksaan agung dan kepolisian tidak memberikan reaksi apa-apa.

67

Sebagai tindakan pengamanan terhadap situasi yang kacau atau bahkan telah matang untuk mulai suatu kudeta komunis itu, para pemimpin Masyumi, M. Natsir, Saifuddin, Baharuddin mengasingkan diri ke Padang Sumatera yang pada akhirnya (1958) bergabung dengan PRRI.⁶⁵

Dalam mengambil tindakan terhadap pemerintahan tandingan PRRI pemerintah lebih memilih tindakan dengan jalan kekerasan walaupun Hatta mengusulkan dengan jalan damai. Kekuatan PRRI ini kemudian dipatahkan ketika pemerintah memberikan amnesti untuk kembali pada pemerintah yang sah dan mereka menyerah.⁶⁶

Saat kepemimpinan Masyumi ditinggalkan M. Natsir ke Padang dan terutama keterlibatan beliau dengan PRRI, pimpinan Masyumi berpindah ke Prawoto Mangkusasmito, seseorang yang dipercaya sepaham dengan M. Natsir terutama dalam usahanya untuk meneruskan perjuangan M. Natsir dalam menentang "pendapat Soekarno".

Setelah menengok perjuangan Masyumi (yang pada

⁶⁵B.J. Boland, Op Cit, hlm. 93. Pertentangan tajam antara presiden dan Masyumi, M. Natsir utamanya mencapai puncaknya dalam bentuk PRRI, melihat keadaan pada waktu itu yang begitu gawat dengan melihat posisi Natsir yang sulit sekali untuk tidak mengelak akan jekan mitra politik seperjuangannya.

⁶⁶Deliar Noer, Op Cit, hlm. 377-378.

waktu itu diperhitungkan sebagai satu-satunya partai politik yang paling getol menentang ketidakadilan yang ada) yang dipelopori M. Natsir terhadap penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, dan sebagai akibat oposisi yang begitu hebat dari Masyumi, maka partai ini telah digiring oleh presiden dari arena percaturan politik nasional, sedangkan eksekusi dari tindakan ini merembet pada koyaknya persatuan dalam tubuh Masyumi.

Ketegangan-ketegangan intern yang juga tidak luput dari liputan penulis adalah yang terjadi pada anggota istimewa Masyumi atau kelompok muda yang erat hubungannya dengan Masyumi, organisasi ini setidaknya-tidaknya menjadi pendukung dan tangan kanannya atau bahkan ketua GPII sendiri duduk dalam pimpinan pusat sebagai anggota Masyumi. Ketidakompakan itu terlihat pada perbedaan sikap yang ditunjukkan GPII terhadap Belanda tentang persoalan Irian Barat, dan GPII turut serta melakukan aksi-aksi yang demonstratif terhadap Belanda, ketika tentara turut serta berpolitik. Sedangkan Masyumi tidak sependapat dengan tindakan ini. Masalah yang lebih serius lagi adalah beredarnya Dahlan Ranuwihardjo (anggota pimpinan pusat GPII) dipilih presiden sebagai anggota DPR Gotong Ro-

69
yong (1960). Walaupun tindakan Dahlan tidak disetujui pimpinan GPII, selain Dahlan sendiri tidak banyak berpengaruh dalam GPII, namun sikap ini sudah menunjukkan ketidak kompakkan dalam tubuh Masyumi,⁶⁷ Sedangkan anggota istimewa Masyumi lainnya bersikap akomodatif terhadap pemerintahan masa itu, seperti Al Jamiiyatul Wasliyah. Tindakan ini dapat dimengerti, karena untuk menyelamatkan serta memperlancar misi (mengislamkan daerah non Islam) serta mempermudah memperoleh dana dari pemerintah. Untuk memperoleh itu semua tentunya harus dibayar dengan sikap kenyal terhadap pemerintah dan menutup mata terhadap kekonyolan yang ada dalam pemerintah. Bagi anggota Masyumi lainnya bersikap sama, organisasi yang merupakan bagian dari Masyumi berangsur melepaskan diri darinya, karena pada umumnya mereka menyelamatkan anggotanya dari posisi Masyumi yang makin lama makin tergencet oleh kediktatoran. Lagi pula Yusuf Wibisono sebagai ketua SBII berpikir bahwa kepentingan buruh berbeda dengan kepentingan politik.

Demi menjaga segala kemungkinan yang terjaditerhadap Masyumi,⁶⁸ dilakukan suatu usaha untuk menye -

⁶⁷ Ibid,

⁶⁸ Mengingat sudah terdengar santer suara-suara bahwa Masyumi akan dibubarkan.

70
lamatkan anggota istimewanya dengan memutuskan anggota dari ikatan partai, dalam suatu rapat tanggal 8 September 1959 di Jakarta.⁶⁹

Seperti diungkap di atas masa kepemimpinan Prawoto, yang cenderung melanjutkan perjuangan M. Natsir (setelah beliau tidak dapat melanjutkan perjuangan politik melalui partai dan kemudian bergabung dengan PRRI) yang semakin lama Masyumi bersikap menentang, sedang presiden yang dianggap menyeleweng dari konstitusi dan tiada lain ingin menegakkan demokrasi terpimpin.

Menjelang pembubaran Masyumi, sebelumnya timbul masalah tentang Penpres (Penetapan Presiden) No. 7 / 1959 dalam penyederhanaan dan syarat partai. Salah satu di antaranya pasal 9 yang menyebutkan "presiden dapat membubarkan partai atau melarang partai yang melakukan pemberontakan karena pemimpinnya turut melakukan Pemberontakan Republik Persatuan Indonesia" (PRRI) atau jelas memberikan bantuan, sedang partai itu

⁶⁹Deliar Noer, Op Cit, hlm. 373-374.

71
tidak dengan resmi menyalahkan anggotanya itu.⁷⁰

Ketua Masyumi segera tanggap terhadap maksud presiden tersebut dan mengulasnya pada bulan Juli 1959, melalui kritiknya yang tajam bahwa "melalui kekuasaan sebenarnya presiden ingin bertindak semauanya terhadap Masyumi, oleh karena Penpres No. 7/1959 merupakan taktik bagi pengunduran terhadap pembubaran Masyumi.

Dugaan ini tidak salah perhitungan. Tepatnya pada tanggal 21 Juli presiden Soekarno kembali memanggil pemimpin-pemimpin Masyumi untuk mengadakan pertemuan dengan menyodorkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para pemimpin partai dalam waktu satu minggu. Seminggu kemudian 28 Juli 1960 tiba pada pertemuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan presiden, dan jawaban yang diberikan

⁷⁰Ibid, hlm. 384, juga terdapat pada P. Mangkusasminto, M. Natsir, Op Cit, hlm. 55. Pertentangan serupa yang sering terjadi sebelumnya, antara pemimpin Masyumi dan presiden ini pada akhirnya dijadikan manuver untuk merobohkan Masyumi melalui legitimasi Penpres di atas. Dan PRRI yang dijadikan sasaran sebagai "kambing hitamnya".

72
Masyumi kepada presiden masih dipertimbangkan.⁷¹ En -
tah jawaban yang diberikan Masyumi kurang memuaskan
presiden atau Masyumi malah bersikap presiden yang te-
lah memberlakukan keputusan dalam bentuk penpres,⁷²
yang jelas presiden telah mengambil tindakan pada tang-
gal 17 Agustus 1960 untuk mengeluarkan keputusan mem-
bubarkan partai Masyumi. Surat yang disampaikan oleh
Direktur Kabinet Presiden ini berbunyi "Paduka yang
mulia telah berkenan memerintahkan kepada kami untuk
menyampaikan keputusan presiden (No. 200/1960) bahwa
partai Masyumi harus bubar. Dalam waktu 30 hari se-
sudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960,
pimpinan partai harus menyatakan partainya bubar .
Pembubaran ini harus diberitahukan kepada presiden se-
cepatnya. Kalau tidak partai Masyumi akan diumumkan
sebagai "Partai Terlarang". Keputusan tersebut juga
disebarkan presiden kepada rakyat, melalui pidatonya

⁷¹Dalam nota jawaban yang diberikan Masyumi pa-
da tanggal 28 Juli 1960 atas pertanyaan "sikap Masyu-
mi terhadap UUD 1945 dikemukakan kepada pemerintah a-
dalah sebagai berikut: "Kami menyatakan tunduk kepada
UUD 1945 yang berlaku, oleh karenanya kami minta ke-
pada semua golongan untuk tunduk pula kepada UUD yang
berlaku itu, termasuk pemerintah, termasuk presiden",
pengakuan Prawoto ini diterbitkan dalam buku Bulan Bi-
tang, dari Medan Jihad, Op Cit, hlm. 31.

⁷²Masalah Penpres ini yang dikatakan Masyumi
melanggar UUD, bahkan UUD 1945 tidak mengenal hukum
jenis ini.

73
yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1960.⁷³

Sebulan sebelum Masyumi menyatakan bubar, untuk tidak bersikap hanya apriori begitu saja, ketua Masyumi Prawoto meminta keadilan atas perlakuan ini, yakni dengan mengadakan presiden ke pengadilan. Karena keputusan No. 200/1960 diistilahkan Ketua Masyumi sebagai "tindak perkosa dari tindak hukum", karena presiden telah melanggar UUD 1945 maka Penpres dikatakan tidak sah, sehingga setiap tindakan yang didasarkan atas penpres merupakan pelanggaran hukum yang bisa digolongkan suatu penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁴ Atas pengaduan ini ternyata pengadilan negeri istimewa Jakarta, mengemukakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara itu. Sebagai tindak lanjut atas usaha ini M. Roem sebagai kuasa Prawoto naik banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Desember (setelah Masyumi bubar), namun Pengadilan Tinggi ~~tidak memberi~~ ~~kah jawabannya~~.

Tiba pada saatnya bagi pimpinan Masyumi mengem-

⁷³Deliar Noer, Op Cit, hlm. 386-387. Juga terdapat dalam M. Natsir, P. Mangkusasmito, Op Cit, hlm. 31.

⁷⁴Ibid, hlm. 387.

bil kebijaksanaan,⁷⁵ untuk memenuhi tuntutan surat
Direktur Kabinet Presiden No. 2730/TU/1960 tanggal
17 Agustus 1960, yang menjadi pengantar dari Kepres
No. 200/1960 mengenai pembubaran Masyumi, melalui su-
rat tanggal 13 September 1960 yang menyatakan bahwa :
dengan adanya putusan presiden No. 200/1960 itu, Ma -
syumi bubar.

Dengan demikian Partai Masyumi tidak patut di -
katakan sebagai partai terlarang, karena belum sampai
masa habis yang dikeluarkan oleh presiden, 30 hari
setelah keputusan dikeluarkan, tepatnya 17 September
1960, pada akhirnya pembubaran Partai Masyumi dilak -
sanakan tanggal 13 September 1960.

⁷⁵Terlepas dari sikap apriori atau tidak, yang
jelas para pemimpin Masyumi dihadapkan oleh dua al -
ternatif, membubarkan partai atau dibubarkan pemerin-
tah dengan kata lain "menjadi "Partai Terlarang". A -
dalah menjadi pertimbangan mereka bahwa bisa dinyata-
kan sebagai partai terlarang otomatis baik partai sen-
diri maupun anggotanya akan mengalami berbagai kesu-
litan. Maka pembubaran partai oleh pemimpin adalah di-
anggap sebagai tindakan yang tepat.